

IMPLEMENTASI PROGRAM KELOMPOK SIMPAN PINJAM DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA MISKIN DI KELURAHAN BONTOPARANG KECAMATAN PARANG KABUPATEN GOWA

Mariana^{1*}, Anwar Parawangi², Amir Muhiddin³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

The purpose of this study was to determine the implementation of the Savings and Loans Group Program in Improving. The type of research was qualitative and the data analysis used was descriptive qualitative. poor family. communication, socialization carried out by implementing actors has been carried out properly and monthly socialization by the manager to group administrators and group members. So that communication in the implementation of savings and loans (SPP) in all parties has gone well, Resources, in the selection of resources to be involved in savings and loan groups (SPP) have gone well. The disposition or attitude of the implementer is that the parties involved provide a good response to the implementer of the Savings and Loans (SPP) program which will later be able to achieve the objectives well. All the implementers involved have actually carried out their respective duties and responsibilities. There are two bureaucratic structures, namely the organizational structure and SOP (Operational Standards and Procedures) It has been running and well fulfilled, and the savings and loan managers, savings and loan group administrators and savings and loan members have fulfilled the bureaucratic structure.

Keywords: *implementation, savings and loans group program*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi Program Kelompok Simpan Pinjam. Jenis Penelitian adalah Kualitatif dan analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya Implementasi dalam pengelolaan program simpan pinjam dalam meningkatkan ekonomi keluarga miskin. komunikasi, sosialisasi yang dilakukan oleh para aktor pelaksana sudah dilaksanakan dengan baik sosialisasi setiap bulan oleh pihak pengelola kepada pengurus kelompok dan anggota kelompok. Sehingga Komunikasi dalam implementasi simpan pinjam (SPP) di semua pihak sudah berjalan dengan baik, Sumber Daya, dalam pemilihan sumber daya untuk terlibat dalam kelompok simpan pinjam (SPP) sudah berjalan dengan baik. Disposisi atau sikap pelaksana implementator bahwa pihak-pihak yang terlibat memberikan respon yang baik terhadap pelaksana program Simpan Pinjam (SPP) yang nantinya dapat mencapai tujuan dengan baik. Semua pelaksana yang terlibat sebenarnya sudah menjalankan tupoksinya masing-masing. Struktur Birokrasi ada dua yaitu struktur organisasi dan SOP (Standar Operasional dan Prosedur) Sudah berjalan dan terpenuhi dengan baik, dan pihak dari pengelola simpan pinjam, Pengurus Kelompok simpan pinjam dan anggota simpan pinjam sudah memenuhi secara struktur birokrasi.

Kata kunci: *implementasi, program kelompok simpan pinjam*

* mariana@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang menghadapi berbagai masalah kependudukan, salah satunya yaitu perekonomian, dan seperti yang kita ketahui fenomena kemiskinan di Indonesia masih sulit dipecahkan. Kemiskinan di Indonesia menyebabkan berbagai masalah-masalah, seperti kebodohan, kelaparan, kesenjangan sosial, masalah kesehatan, dan tindakan kriminalitas yang semakin hari semakin meningkat.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang harus dihadapi oleh setiap negara tidak memandang negara maju atau negara berkembang. Krisis ekonomi yang berkepanjangan yang dialami oleh bangsa Indonesia telah membawa dampak yang sangat luas bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia, baik aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, dan aspek lainnya. Krisis ini telah membawa penderitaan bagi bangsa Indonesia terutama bagi masyarakat miskin yang semakin miskin.

Pengentasan kemiskinan hanya bisa diselesaikan melalui sinergi dari berbagai pihak yang berkompeten dan berbagai program pengentasan kemiskinan, yang dirancang dan

diimplementasikan oleh berbagai unsur terkait termasuk pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan ialah dengan menyediakan dana Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, sebagai alternatif penyediaan modal usaha dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama sektor kecil, sebagai langkah strategis untuk membangun kemandirian masyarakat yang kurang mampu. Setiap anggota lebih mudah mendapatkan modalnya secara konsumtif maupun produktif. Program ini ditujukan agar masyarakat lebih berdaya dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam rangka pembangunan desa serta tujuan lainnya yaitu dalam pengentasan kemiskinan.

Bagi masyarakat miskin yang telah memasuki usia kerja, mayoritas dari mereka berpendidikan rendah, ketrampilan yang minim serta modal yang sedikit. Salah satu jenis pekerjaan yang menjadi solusi dari permasalahan tersebut yaitu dengan bekerja atau membuka lapangan kerja di sektor Usaha Mikro dan Kecil. Sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) disamping tidak memerlukan modal yang banyak, juga kurang mensyaratkan tingkat

keampilan tenaga kerja yang tinggi sehingga Usaha Mikro dan Kecil merupakan sektor ekonomi yang paling diminati terutama bagi masyarakat miskin. Bagi pekerja tidak terampil dan menganggur, usaha mikro dan kecil dianggap sebagai pilihan yang sesuai bagi penyediaan kesempatan kerja serta untuk perolehan pendapatan. Disamping itu, usaha mikro dan kecil dipandang sebagai sektor yang menjanjikan bagi para pelaku wirausaha.

Implementasi program kelompok simpan pinjam dalam meningkatkan ekonomi keluarga miskin adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti yang telah direncanakan. *Output* adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. *Output* biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. *Outcomes* adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya output kebijakan. *Outcomes* biasanya diukur setelah keluarnya *output* atau dalam waktu yang lama pasca implementasi kebijakan.

Implementasi program kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) dalam meningkatkan ekonomi keluarga miskin merupakan usaha pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan dan juga juga untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 juga mencanangkan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM Mandiri). Yang terdiri dari PNPM mandiri pedesaan, PNPM mandiri perkotaan, Serta PNPM mandiri wilayah khusus dan Desa tertinggal. Beberapa keberhasilan program simpan pinjam kelompok perempuan adalah berupaya penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat

Dasar hukum pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amendemennya, landasan idiologi pancasila dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Indonesia memiliki problem mengenai kemiskinan maupun pengangguran. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan tetap bekerja otonom sebagai sebuah Program Nasional dalam rangka

penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara legal berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/371PMD tanggal 5 Nopember 2008 perihal petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan, maupun Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Nomor 414.2/4916/PMD tanggal 7 Desember 2009 perihal Petunjuk Tehnis Optimalisasi Tahapan kegiatan PNPM mandiri Perdesaan. Demikian pula pelaksanaan Musrenbangdes tetap berjalan otonom berdasarkan aturan legal sebagaimana dituangkan dalam Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, maupun Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 Perihal Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa.

Sasaran Implementasi program Kelompok simpan pinjam (SPP) dalam meningkatkan ekonomi keluarga miskin di Indonesia diantaranya Kelurahan Bontoparang Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, termasuk salah satu yang masuk dalam program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri pedesaan (PNPM MP) kelompok simpan pinjam (SPP) karena lapisan masyarakatnya yang beragam

dari mulai petani, pedagang, pejabat ataupun sopir yang kesemuanya itu mempunyai kebutuhan hidup, akan tetapi lahan pertanian dalam kelurahan tersebut sudah sempit, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup dari sekian banyak profesi diatas maka pekerjaan yang paling dominan untuk usaha mereka adalah berdagang sehingga untuk usaha tersebut mereka meminjam pada bank, sebagai modal awal dan juga untuk memajukan usaha kecil mereka demi meningkatkan taraf ekonomi untuk hidup yang lebih baik.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam hal mensejahterakan masyarakat dengan memberdayakan masyarakat mencanangkan sebuah program Kelompok Simpan Pinjam yang dikhususkan untuk para perempuan-perempuan yang memiliki usaha dengan pemberian modal guna membantu perekonomian keluarga. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek penyadaran, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan. Banyak Masyarakat kelurahan Bontoparang yang berdagang kecil-kecilan terlebih lagi kaum perempuan atau ibu-ibu. Berdagang dilakukan guna membantu

perekonomian keluarga supaya dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, program Kelompok simpan pinjam yang dilaksanakan di pedesaan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat sehingga masih banyak program kelompok simpan pinjam yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat mestinya tidak hanya dalam tahap pelaksanaan, namun pada tahap perencanaan sampai tahap evaluasi, sehingga menjadikan masyarakat bukan hanya sebagai objek sasaran program melainkan sebagai subjek dan objek.

Adanya Program Kelompok Simpan Pinjam suku bunganya yang lebih rendah dari pada bank, diharapkan dapat membantu masyarakat terutama kaum perempuan dan juga dapat meningkatkan taraf hidup serta menunjang perekonomian Negara. Kelompok Simpan Pinjam (SPP) mempunyai sistem tanggung renteng apabila terjadi wanprestasi.

Adapun persyaratan menjadi kelompok Simpan Pinjam yakni: Kelompok perempuan yang mempunyai ikatan pemersatu dan saling mengenal minimal satu tahun, mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang di sepakati, telah

mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang di berikan kepada anggota, kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik dan mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana (PENJELASAN IV PTO Kegiatan SPP,BAPEMMAS.2007).

Ripley dan Franklin dalam (Winarno, 2014: 148) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Menurut Ripley dan Franklin, ada tiga cara yang dominan bagi suksesnya implementasi kebijakan, yaitu: a. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, b. Adanya kelancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah, c. Pelaksanaan dan dampak yang dikehendaki terarah.

Ketiga perspektif tersebut digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, sehingga menjadi lebih mudah untuk diidentifikasi. Teori Ripley dan Franklin

ingin menekankan tingkat kepatuhan para implementor kebijakan terhadap isi kebijakan itu sendiri. Setelah ada kepatuhan terhadap kebijakan yang ada, pada tahap selanjutnya melihat kelancaran pelaksanaan rutinitas fungsi, serta seberapa besar masalah yang dihadapi dalam implementasi. Pada akhirnya setelah semua berjalan maka akan terwujud kinerja yang baik dan tercapainya tujuan (dampak) yang diinginkan.

Donald Van Metter dan Carl VanHorn dalam Sujianto (2008:34) mengembangkan model implementasi kebijakan klasik yang mengasumsi bahwa implementasi kebijakan bekerja sejalan dengan proses kebijakan. Pada generasi pertama implementasi kebijakan berhimpit dengan studi pengambilan keputusan di sektor publik. Studi awal implementasi kebanyakan hanya berupa catatan–catatan, meski cukup rinci, mengenai bagaimana sebuah keputusan otoritatif dilaksanakan. Studi awal ini dilakukan oleh Martha Derthick (1972), yang mengatakan bahwa program – program publik yang disponsori oleh pemerintah jarang yang berhasil mencapai tujuan (Wahab, 2012:161).

Keberhasilan implementasi akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel

tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dengan adanya implementasi kebijakan mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan secara rinci, maka implementasi yang dilakukan akan berjalan dengan baik.

Pada konsep implementasi, implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivat* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan.

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan,

apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan tersebut menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication, resources, disposition,* dan *bureaucratic structure* Edward dalam Widodo, 2011:96-110.

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (Widodo, 2011:97).

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa: bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif

maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi.

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). Standart Operation Prosedur (SOP) menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan

dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat (Abidin, 2012:19).

Kebijakan publik adalah peraturan perundangan yang digunakan sebagai dasar tindakan pemerintah untuk mengatur dan melayani masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari. Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau perda adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain keppres, inpres, kepmen, keputusan kepala daerah, keputusan kepala dinas, dll (Nugroho, 2014:357).

Carl Friedrich dalam Indiahono (2009:18) mendefinisikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh

seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan hambatan tertentu seraya mencari peluang peluang untuk mencapai tujuan tertentu.

Program Kelompok Simpan Pinjam merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Program simpan pinjam kelompok perempuan ini adalah kegiatan yang dicanangkan oleh sebuah lembaga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP).

Menurut Widodo 2011, kemiskinan merupakan obsesi bangsa dan persoalan amat mendasar yang harus ditangani penduduk miskin umumnya tidak berpenghasilan cukup, bahkan tidak berpenghasilan sama sekali. Penduduk miskin pada umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya pada kegiatan ekonomi sehingga tertinggal dari masyarakat lainnya.

Dimensi kemiskinan menurut Effendi dalam Muslimah 2018, kemiskinan ini dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumber daya alam yang tersedia pada kelompok itu, dan membandingkannya dengan ukuran-ukuran baku. Menurut pengertian ini

kemiskinan kelompok orang dikaitkan dengan pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya mengacu pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Lurah Bontoparang Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, sedangkan waktu penelitian ini dilaksanakan selama 2 (Dua) bulan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif adalah bersifat deskriptif dan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah unsur pengelola PNPM-MP: Ketua UPK (M.S), Sekretaris UPK (SS), Bendahara UPK (NY), Unsur Pemerintah Kelurahan : Lurah Bontoparang (SB), Pengurus Kelompok Simpan Pinjam : 3 orang Ketua kelompok (RN, RM, HT), Anggota Kelompok Simpan Pinjam : 3 orang Anggota kelompok (NB, RN, RY), dan 2 orang masyarakat (M dan R) yang dipilih menggunakan Teknik purposive sampling bahwa informan memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Data yang dikumpulkan menggunakan instrument berupa; Observasi dan Dokumentasi serta dikembangkan wawancara terhadap informan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data interaktif dari Miles dan Huberman (1992: 20), penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dan analisis data yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing/verification, setelah penelitian melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan anticipatory sebelum melakukan reduksi data, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data dengan penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Setelah itu adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten mengenai Implementasi Program Simpan Pinjam Dalam meningkatkan Ekonomi Keluarga Miskin Dikelurahan Bontoparang Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan.

Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) agar proses Implementasi Program Kelompok Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Miskin Di Kelurahan Bontoparang Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Berikut adalah wawancara dengan Ketua UPK mengatakan bahwa Tentunya kami dari pihak UPK dalam setiap pertemuan kami selalu mensosialisasikan dan mengkomunikasikan dengan baik tentang SPP (Simpan pinjam Perempuan) Kelurahan Bontoparang agar ikut bergabung dalam kelompok SPP (Simpan pinjam Perempuan) supaya masyarakat lebih mandiri dan meningkatkan perekonomian bagi masyarakat.

Ketua UPK mensosialisasikan tentang SPP (Simpan pinjam Perempuan) agar masyarakat berpartisipasi dan ikut bergabung dalam kelompok simpan pinjam dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendorong kemandirian masyarakat agar dapat berdaya guna dan berhasil

guna bagi upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas masyarakat.

Hasil wawancara diatas bahwa dalam komunikasi yang dilakukan yaitu komunikasi antar pribadi yang dilakukan kepada masyarakat agar masyarakat lebih mudah memahami. Apa hak dan kewajiban setelah menjadi anggota kelompok simpan Pinjam (SPP), setelah membangun komunikasi dengan baik UPK akan melakukan pendekatan dengan masyarakat terutama dengan anggota. Tujuan yang dilakukan komunikasi antar pribadi karena dinilai sangat efektif untuk mengubah perilaku orang lain, bila terdapat persamaan mengenai makna yang dibicarakan, Komunikasi antar pribadi ini terletak pada arus balik langsung, arus balik tersebut memiliki daya tangkap yang muda untuk komunikator.

Sumber Daya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Mengemukakan bahwa: bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang

mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Pemilihan sumber daya manusia adalah salah satu faktor penting dalam sebuah kelompok simpan pinjam oleh karena itu, perlu dilakukan manajemen sumber daya manusia dengan baik agar kelompok simpan pinjam dapat meningkat dan pengaturan dana simpan pinjam lebih terarah, pemilihan pengurus kelompok simpan pinjam adalah yang paling penting karena pengurus simpan pinjam adalah orang berkaitan langsung dengan anggota kelompok simpan pinjam dan masyarakat.

Sumber daya manusia adalah komponen penting yang berfungsi sebagai penggerak kegiatan dalam simpan pinjam. Peran sumber daya manusia dalam kelompok simpan pinjam dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan sebagai komponen yang sinergi sumber daya manusia yang ada sehingga dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi dalam kelompok simpan pinjam.

Disposisi

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan

implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakn akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi Program kelompok Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Miskin di Kelurahan Bontoparang Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Di ungkapkan Ketua UPK pengelola Kelurahan Bontoparang banyaknya masalah yang ada di dalam kelompok simpan pinjam yang terjadi di tekankan bahwa pihak pengurus dan anggota kelompok dapat bertanggung jawab, karena kepercayaan timbal balik,

baik itu kepercayaan kepada pengurus, anggota dan Pemerintah ini agar dalam pengelolaan dana simpan pinjam berjalan dengan baik.

Karena dasarnya pengelolaan dana simpan pinjam adalah kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya pertanggung jawaban yang berupa keterbukaan atas aktifitas pengelola simpan pinjam.

Berdasarkan dengan wawancara diatas bahwa masalah-masalah yang ada dalam kelompok simpan pinjam adalah tunggakan kelompok atau ketidak tepatan waktu dalam pembayaran, dan dalam kelompok simpan pinjam ini adalah tanggung renteng yaitu masalah yang di tanggung oleh anggota kelompok akan di tanggung Bersama dalam kelompok tersebut dan Adapun sanksi yang di berikan oleh pihak pengelola kelompok simpan pinjam adalah setiap kelompok yang bermasalah tidak akan di beri pinjaman lagi walaupun dalam kelompok tersebut sudah melakukan pelunasan.

Karena pertanggung jawaban dalam kelompok simpan pinjam ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong terciptanya tanggung jawab baik di kelompok simpan pinjam itu sendiri atau di pengelola simpan pinjam, pertanggung jawaban dalam pengelolaan dana simpan pinjam ini

merupakan pertanggung jawaban mengenai apakah suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah etika dan tanggung jawab.

Struktur Birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Hasil wawancara penulis dengan Ketua UPK mengatakan bahwa dalam pengelolaan dana simpan pinjam kami ada struktur organisasi kami juga ada SOP, adanya SOP dalam pengelolaan dan simpan pinjam ini bertujuan agar

para pengelola dana simpan pinjam, pengurus simpan pinjam. Adapun tujuan dari SOP ini untuk melindungi para pengelola simpan pinjam pengurus dan anggota dari tindak kesalahan yang bersumber baik dari faktor administrasi atau lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai topik permasalahan dalam penulisan skripsi ini, sebagaimana yang telah di jabarkan dan dijelaskan mengenai implementasi program kelompok simpan pinjam dalam meningkatkan ekonomi keluarga miskin di Kelurahan Bontoparang Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Secara Komunikasi yaitu koordinasi dan komunikasi, sosialisasi yang dilakukan oleh para aktor pelaksana sudah dilaksanakan dengan baik dan berkelanjutan yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) melalui Program simpan pinjam (SPP) di Kelurahan Bontoparang dan sosialisasi setiap bulan oleh pihak pengelola kepada pengurus kelompok dan anggota kelompok. Sehingga Komunikasi dalam implementasi simpan pinjam (SPP) di

semua pihak sudah berjalan dengan baik.

Secara Sumber Daya yang dimiliki oleh masyarakat Kelurahan Bontoparang maka dalam pemilihan sumber daya untuk terlibat dalam kelompok simpan pinjam (SPP) sudah berjalan dengan baik.

Disposisi atau sikap pelaksana implementator bahwa pihak-pihak yang terlibat memberikan respon yang baik terhadap pelaksana program Simpan Pinjam (SPP) yang nantinya dapat mencapai tujuan dengan baik. Semua pelaksana yang terlibat sebenarnya sudah menjalankan tupoksinya masing-masing.

Secara Struktur Birokrasi ada dua yaitu struktur organisasi dan SOP (Standar Operasional dan Prosedur) Sudah berjalan dan terpenuhi dengan baik, dan pihak dari pengelola simpan pinjam, pengurus kelompok simpan pinjam dan anggota simpan pinjam sudah memenuhi secara struktur birokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal, 2012. *Kebijakan Publik*, Jakarta: Penerbit Salemba Humanika
- Anjarwati, Rian. 2009. *Implementasi Pemberian Kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Dalam*

- Meningkatkan Pendapatan Pedagang Golongan Ekonomi Lemah Di Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi*
- Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service)
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Penjelasan IV 2007. (*Petunjuk Teknis Operasional*) *Kegiatan SPP*. Jakarta: Bapemmas.
- Rudianto. 2010. *Akuntansi Koperasi Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga
- Rachmawati, Rizka Dian. 2011. *Analisis Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM- MP) Terhadap Perekonomian Anggota Simpan Pinjam Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen* (Skripsi, Universitas Sebelah Maret).
- Sujiono, Bambang.Dkk. 2008. *Metode Pengembangan Fisik*. Jakarta. Universitas Terbuka.
- Santoso, Budi. 2012. *Pengaruh Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan terhadap Pendapatan Perempuan di Kabupaten Sragen*
- Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media
- Widodo, Slamet. 2011. *Strategi Nafka Berkelanjutan Bagi Rumah Tangga Miskin Di Daerah Pesisir*. MAKARA. Volume 15, Nomor 1 Jakarta: Universitas Indonesia.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan publik: Teori dan Proses Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS
- _____. 2016. *Kebijakan Public Era Globaliasi (Teori, Proses dan Studi Kasus Komparatif)*,